



Kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatera Barat dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Muthia Julian Zahra¹, Irma Cahyani², Raudhatul Natasya Annur³, Kencana
Firjatullah Kusuma⁴, Yulia Hanoselina⁵, Rahmadhona Fitri Helmi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang, Indonesia

Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara,
Kota Padang, Sumatera Barat

Email : muthiajulian@gmail.com¹, irmacahyani2323@gmail.com², raudhatulnatasyaannur@gmail.com³,
firjatullahkusumakencana@gmail.com⁴, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁵,
rahmadhonaafh@fis.unp.ac.id⁶

Abstract. *Kesbangpol West Sumatra Province has a strategic role in preventing corruption, which is still a serious challenge in Indonesia. This research aims to evaluate the contribution of Kesbangpol in preventing corruption through theoretical and practical approaches. This study adopts Weberian bureaucratic theory, good governance, anti-corruption, and state administration ethics as a conceptual basis. The research uses qualitative methods through interviews, direct observation and documentation studies. The research results show that Kesbangpol has implemented various strategic steps such as anti-corruption education programs, strengthening transparency, as well as preventive, repressive and detective approaches. Educational programs include political education and national insight aimed at building community integrity, especially the younger generation. Transparency strategies include wealth reporting, digital-based financial management, and online attendance to reduce the potential for abuse of authority. Harmony between Weberian bureaucratic theory, good governance, and anti-corruption approaches has proven effective in forming an efficient, accountable and transparent bureaucratic system. However, technical challenges and lack of intensive supervision remain obstacles to policy implementation. This research has the implication that the application of technology and strengthening internal supervision can strengthen the role of Kesbangpol in creating a clean and stable government.*

Keywords *Kesbangpol, Corruption, Administrative Ethics, Good Governance, Anti-Corruption*

Abstrak. Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi Kesbangpol dalam mencegah korupsi melalui pendekatan teoritis dan praktis. Kajian ini mengadopsi teori birokrasi Weberian, good governance, anti-korupsi, dan etika administrasi negara sebagai landasan konseptual. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Kesbangpol telah melaksanakan berbagai langkah strategis seperti program edukasi antikorupsi, penguatan transparansi, serta pendekatan preventif, represif, dan detektif. Program edukasi mencakup pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang ditujukan untuk membangun integritas masyarakat, terutama generasi muda. Strategi transparansi mencakup pelaporan harta kekayaan, pengelolaan keuangan berbasis digital, dan absensi online untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Keselarasan antara teori birokrasi Weberian, good governance, dan pendekatan anti-korupsi terbukti efektif dalam membentuk sistem birokrasi yang efisien, akuntabel, dan transparan. Meski demikian, tantangan teknis dan kurangnya pengawasan intensif masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penerapan teknologi dan penguatan pengawasan internal dapat memperkuat peran Kesbangpol dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan stabil.

Kata Kunci: Kesbangpol, Korupsi, Etika Administrasi, Good Governance, Anti-Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat dinyatakan bahwa pelayanan publik yang berjalan baik ialah salah satu bagian penting untuk dapat menciptakan tumbuhnya kenyamanan maupun kesejahteraan bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga bagian

dalam penanggung jawab utama yang diharapkan agar dapat memberi tata Kelola yang efektif dan efisien, yang dapat diapresiasi oleh masyarakat yang melihatnya. Meskipun demikian, di berbagai banyaknya datang tantangan yang akan dialami bangsa Indonesia, contohnya seperti perpecahan dan ketidakharmonisan antara pihak pemerintah, masyarakat yang mana tetap berjalan untuk menghadapi permasalahan tersebut. pada tahun 1950 yang mana pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga penting yang mendirikan Kantor Persatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KKbPM), yang berfungsi dalam mencari jalan keluar masalah terkait konflik sosial dan juga menjaga ketentraman masyarakat. Serentak dengan berjalannya waktu yang berubah – ubah, maka pada tahun 1980 lembaga ini mengalami suatu transformasi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dengan memiliki tujuan bahwa untuk memperteguh fungsi politik serta menjaga keutuhan negara dan kemakmuran masyarakat. Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetimbangan politik dan menyelesaikan berbagai konflik yang dapat mengakibatkan membahayakan persatuan suatu bangsa.

Tetapi, Badan Kesbangpol sendiri juga sudah mempunyai banyak peranan peting, yakni lembaga ini tidak lepas dari sorotan, pada dasarnya dalam hal korupsi dan politik. Korupsi di lingkungan birokrasi pemerintah, termasuk juga di Badan Kesbangpol. Masih menjadi suatu konflik serius yang dapat mengancam tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan laporan CPI 2023, menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan nilai yang rendah dalam hal pembasmian korupsi, yang menyatakan bahwa kegiatan korupsi masih suatu yang lumrah dan menjadi isu besar yang perlu segera diatasi.

Dalam konteks badan kesbangpol Prov Sumbar, etika administrasi menjadi sangat relevan karena etika administrasi publik dapat menjadi pedoman bagi administrator publik untuk mencegah korupsi di lingkungan birokrasi. Korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika yang dapat merugikan masyarakat dan organisasi. Pelanggaran etika tersebut tidak hanya merugikan satu kelompok saja tetapi semua orang dapat merasakan dampak dari pelanggaran etika tersebut. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai dimana-mana, fakta menunjukkan bahwa korupsi tersebut ada di setiap negara negara berkembang maupun negara yang maju. Korupsi merupakan suatu tradisi turun temurun dalam hal negatif yang dimiliki oleh bangsa yang masih berkembang seperti Indonesia, yang masih banyak sekali korupsi yang banyak terjadi pada kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga yang berangsur paut dengan pemerintah itu sendiri.

Dengan dilihat bahwa banyaknya kegiatan korupsi yang terjadi di berbagai tempat dan pihak yang melakukan hal tersebut, dan membuat masyarakat kurang kepercayaan dengan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah. Korupsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, masih menjadi masalah yang serius. Bagaimana kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan korupsi? Apakah program-program yang telah dilakukan efektif? Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai kontribusi Kesbangpol Sumatera Barat dalam mencegah korupsi, dengan mengacu pada pengumpulan data lapangan, wawancara dengan narasumber, serta analisis terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dalam memahami dan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, penelitian ini mengadopsi berbagai teori yang saling melengkapi, yaitu teori birokrasi, teori good governance, teori anti-korupsi, dan etika administrasi negara. Teori-teori ini dipilih karena mampu menjelaskan aspek struktural, tata kelola, strategi, dan etika dalam administrasi publik yang relevan dengan tugas dan fungsi Kesbangpol. Kajian teori ini akan dimulai dengan konsep birokrasi Weberian, diikuti oleh teori good governance, teori anti-korupsi, dan ditutup dengan pembahasan tentang etika administrasi negara.

a) Etika Administrasi Negara

Etika administrasi negara adalah prinsip moral dan norma yang menjadi landasan perilaku pejabat dan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Etika ini mencakup aspek tanggung jawab, transparansi, keadilan, dan kepentingan publik (Choirulsyah & Azhar, 2024). Dalam konteks administrasi publik di Indonesia, etika sering digunakan sebagai parameter untuk menilai kepatuhan aparatur negara terhadap norma dan standar layanan yang berorientasi pada masyarakat. Etika administrasi negara berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang.

Implementasi etika administrasi yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas, mencegah konflik kepentingan, dan memperkuat integritas aparatur negara (Asih, 2018). Dalam prakteknya, penerapan kode etik di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pelanggaran kode etik yang sering terjadi di lingkungan birokrasi. Penelitian Asih (2018) menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi di Indonesia seringkali terhambat oleh budaya birokrasi yang hierarkis dan lemahnya sistem

pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas etika dalam administrasi negara, perlu adanya penguatan regulasi dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran kode etik.

b) Konsep Birokrasi dari Max Weber

Max Weber (1864-1921), seorang sosiolog Jerman, telah dikenal sebagai seorang analis birokrasi. Dia mencoba menjawab pertanyaan apakah birokrasi menghasilkan inefisiensi atau meningkatkan efisiensi administrasi. Menurut Max Weber, birokrasi adalah sistem organisasi yang menekankan rasionalitas, hierarki yang jelas, dan efisiensi tinggi dalam pengelolaan administrasi. Struktur birokrasi Weberian, meskipun ideal, sering kali menghadapi tantangan berupa maladministrasi dan korupsi (Sawir, 2020). Konsep birokrasi ideal Weberian bergantung pada istilah "rasional". Selama bertahun-tahun, banyak orang yang mengartikan birokrasi Weberian sebagai fungsi birokrasi. Birokrasi adalah cara yang logis untuk mencapai sejumlah tujuan. Ia merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Pejabat tidak akan menetapkan tujuan. Fungsi politik yang menjadi masternya adalah menetapkan tujuan. Dalam birokrasi pemerintah, semua karyawan dan pejabat berfungsi sebagai penggerak dan pemicu mesin yang tidak memiliki kepentingan pribadi. Setiap pejabat pemerintahan tidak diizinkan untuk memikul tanggung jawab publik kecuali dalam bidang tugas dan tanggung jawab yang telah dimandatkan kepada mereka. Pejabat birokrasi pemerintah dianggap bertanggung jawab selama tugas dan tanggung jawab mesin itu dijalankan sesuai dengan protokol.

Dalam praktiknya, birokrasi seringkali rentan terhadap korupsi, meskipun birokrasi ideal memiliki fitur seperti hierarki yang jelas, peraturan yang tegas, dan rekrutmen berdasarkan kompetensi.

c) Teori Good Governance

Konsep penting dalam administrasi publik adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas. Prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi dan akuntabilitas, memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat korupsi dalam birokrasi pemerintah. Good governance menghubungkan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan efisiensi dan kepercayaan publik (Rorong & Lengkong, 2016).

UNDP (United Nations Development Programme) mengatakan bahwa pemerintahan yang baik berfokus pada bagaimana proses pemerintahan dapat berjalan dengan adil, bersih, dan efektif. Tujuan World Bank adalah untuk meningkatkan tata

kelola ekonomi yang mendukung administrasi negara. Anti korupsi adalah komponen penting yang membedakan politik dan ekonomi.

Selain itu, World Bank menetapkan prinsip good governance dalam hubungan antara negara dan masyarakatnya. Dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi setiap negara, prinsip-prinsip kerja administrasi publik yang baik dianggap dapat mengurangi tingkat korupsi dalam birokrasi pemerintahan.

Dalam konteks Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, teori ini dapat digunakan untuk menilai bagaimana lembaga tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses administratif dan keputusan yang dibuat tidak hanya efisien tetapi juga akuntabel. Untuk mencegah korupsi, Kesbangpol diharapkan dapat mendukung praktik pemerintahan yang baik.

d) Teori anti korupsi

Menurut Robert Klitgaard (1988) dalam bukunya "Controlling Corruption", pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang jelas adalah kunci untuk mencegah korupsi. Teori anti-korupsi Klitgaard (1988) menekankan pentingnya pengawasan internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks birokrasi Indonesia, pengawasan ini harus disertai dengan penerapan kode etik dan audit reguler (Anwaruddin, 2006).

Jika ada mekanisme pengawasan yang kuat dan tanggung jawab yang jelas, korupsi dapat dihilangkan. Penelitian ini akan menggunakan teori anti-korupsi untuk menilai upaya Kesbangpol dalam menerapkan mekanisme pencegahan korupsi seperti pengawasan internal, audit, dan tindakan preventif lainnya. Metode ini akan membantu memahami seberapa baik Kesbangpol telah menerapkan strategi anti-korupsi.

3. METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan pembelajaran etika administrasi publik dalam mengetahui peran Kesbangpol Sumatera Barat dalam mencegah korupsi. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan berbagai wawancara, pengamatan pribadi dan penggunaan subjek yang sedang diteliti dan dikumpulkan dari teks hasil pengamatan dan penelitian sosial. Menurut ahli yakni Bogdan dan Taylor, mereka berpendapat bahwa prosedur penelitian dalam kualitatif merupakan satu diantara yang ada langkah penelitian yang dapat menciptakan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan juga perilaku orang – orang yang diamati. Data deskriptif digunakan untuk meneliti masalah – masalah

berdasarkan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan dan juga melibatkan pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini mempunyai dua sumber data. Yang pertama adalah data yang diperoleh langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditargetkan, dan yang lainnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang langsung dan tepat sasaran, berkaitan dan relevan dengan makalah penelitian yang telah disiapkan sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah Sekretaris Badan, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan juga Kabid Politik Dalam Negeri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Kesbangpol Sumatera Barat telah mengambil berbagai tindakan strategis untuk mendukung pencapaian pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Hal ini mencakup langkah-langkah preventif, represif, dan detektif yang berfokus pada mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Melalui pendekatan tersebut, Kesbangpol berupaya mengedukasi masyarakat, membina pegawai pemerintah, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam setiap aspek kegiatan birokrasi.

Dalam pembahasan ini, kami akan menguraikan hasil-hasil penelitian secara lebih rinci dengan membahas langkah-langkah yang diambil oleh Kesbangpol, mengaitkan dengan teori-teori dasar yang relevan, serta menganalisis pengaruh dari kebijakan dan strategi yang diterapkan terhadap pencegahan korupsi di provinsi tersebut. Dengan melihat keselarasan antara teori birokrasi Weberian, prinsip good governance, dan teori anti-korupsi, kita dapat memahami bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan stabil, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan operasional.

Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara mendalam dengan pegawai Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan narasumber seperti Adi Darma, Fajar Noor Ramadhian dan Weni Evalina. Lokasi penelitian adalah kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Rentang waktu penelitian berlangsung pada 3 september sampai dengan 30 september 2024

Lokasi dan Konteks Penelitian

Kesbangpol Sumatera Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena peran strategisnya dalam menjaga stabilitas politik dan sosial serta dalam pencegahan korupsi. Provinsi Sumatera Barat ini memiliki tantangan unik karena karakteristik masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai adat, namun di sisi lain menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum, termasuk korupsi.

Hasil Analisis Data

Program Edukasi Antikorupsi

Kesbangpol Sumatera Barat melaksanakan program sosialisasi antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan politik dan pementapan nilai-nilai kebangsaan. Materi sosialisasi mencakup:

1. Pengenalan karakter bangsa
2. Wawasan kebangsaan
3. Pemahaman ideologi negara

Sasaran utama adalah masyarakat umum, terutama anak muda. Program ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan etika, serta mendorong generasi muda untuk menghindari praktik-praktik negatif seperti politik uang.

Tabel 1. Komponen Program Sosialisasi Antikorupsi

Komponen Program	Sasaran	Tujuan
Pendidikan politik	Masyarakat umum	Membentuk kesadaran akan pentingnya demokrasi tanpa korupsi
Wawasan kebangsaan	Anak muda	Menguatkan nilai-nilai Pancasila
Antikorupsi	Pegawai internal	Memperkuat integritas aparatur pemerintah

Pencegahan Melalui Transparansi dan Akuntabilitas

Kesbangpol menerapkan berbagai strategi untuk mencegah korupsi, termasuk:

- Pelaporan Harta Kekayaan: Pegawai diwajibkan melaporkan harta kekayaannya secara berkala.
- Pengelolaan Keuangan Transparan: Sistem transfer gaji langsung ke rekening pegawai mengurangi potensi penyalahgunaan dana.
- Absensi Online (ABON): Aplikasi ini membantu memastikan akurasi data kehadiran pegawai dan mengurangi potensi manipulasi.

Strategi Pencegahan Internal: Preventif, Represif, Detektif

Strategi yang diterapkan Kesbangpol Sumatera Barat terdiri dari tiga pendekatan:

- Preventif: Mengurangi potensi korupsi melalui sistem birokrasi yang efisien.
- Represif: Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar.
- Detektif: Penguatan pengawasan melalui audit internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran.

Keterkaitan dengan Konsep Dasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan teori dasar:

Etika Administrasi Negara

Etika administrasi negara menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur negara. Dalam konteks Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi negara telah diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan internal. Misalnya:

- Pelatihan Etika Kerja: Pegawai Kesbangpol diberikan pelatihan etika kerja untuk memastikan bahwa setiap tindakan mereka sesuai dengan prinsip moral dan regulasi.
- Transparansi Keuangan: Sistem transfer gaji langsung ke rekening pegawai mencerminkan akuntabilitas dan keadilan.

Birokrasi Weberian

Birokrasi Weberian menekankan pentingnya struktur organisasi yang rasional, terstruktur, dan didasarkan pada aturan yang jelas untuk memastikan efisiensi dan penghindaran dari penyalahgunaan wewenang. Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat menerapkan sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, prosedur administratif yang sistematis, serta pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pengambilan keputusan. Hal ini membantu meminimalkan ketidakjelasan dalam proses administratif yang bisa membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, struktur hierarkis yang tegas juga memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dalam implementasinya, Kesbangpol mengurangi interaksi langsung antara pegawai dan masyarakat dalam pengurusan surat perizinan, yang berpotensi membuka celah untuk praktik korupsi. Ini sejalan dengan prinsip Weberian yang menekankan pada efisiensi birokrasi dan pengurangan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

Good Governance

Teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam administrasi publik. Dalam konteks ini, Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Program sosialisasi anti-korupsi, wawasan kebangsaan, dan pencegahan politik uang adalah contoh nyata dari upaya Kesbangpol dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan korupsi. Penerapan sistem pelaporan harta kekayaan pegawai dan pengawasan melalui audit internal juga merupakan bagian dari upaya Kesbangpol untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Prinsip partisipasi masyarakat juga diwujudkan melalui sosialisasi dan pendidikan publik mengenai etika politik dan pengaruh buruk politik uang terhadap kualitas demokrasi.

Teori Antikorupsi

Kesbangpol mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, dan detektif yang terdapat dalam teori anti-korupsi untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam birokrasi. Program preventif melalui pendidikan antikorupsi dan wawasan kebangsaan bertujuan untuk membangun kesadaran dini pada generasi muda dan masyarakat tentang pentingnya integritas dan menghindari praktik korupsi. Pendekatan represif diimplementasikan melalui kebijakan yang menindak tegas pegawai yang terlibat dalam praktik korupsi, dengan sanksi yang jelas dan tegas. Di sisi lain, pendekatan detektif mengedepankan pengawasan internal yang ketat, serta penggunaan teknologi seperti aplikasi absensi online dan pelaporan harta kekayaan pegawai untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang.

Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang menyoroti pentingnya kombinasi transparansi, pengawasan internal, dan pendidikan antikorupsi dalam mencegah korupsi di lembaga pemerintahan. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan spesifik, seperti kendala teknis dalam implementasi teknologi dan kurangnya pengawasan intensif, yang belum sepenuhnya teratasi dalam konteks Sumatera Barat.

Implikasi Teoretis dan Terapan

Implikasi Teoretis

Penelitian ini menguatkan relevansi teori etika administrasi negara, birokrasi Weberian, good governance, dan antikorupsi dalam konteks lembaga pemerintahan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi prinsip-prinsip ini dapat menjadi pendekatan holistik untuk mengatasi korupsi.

Implikasi Terapan

1. Bagi Lembaga Pemerintahan: Strategi transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh Kesbangpol dapat diadopsi oleh lembaga lain.
2. Bagi Kebijakan Publik: Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan korupsi. Berbagai langkah strategis telah diambil, mulai dari program edukasi antikorupsi yang menyoar masyarakat luas, khususnya generasi muda, hingga penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang ketat dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Pendekatan multi-dimensi yang diadopsi Kesbangpol, yaitu preventif, represif, dan detektif, telah sejalan dengan berbagai teori terkait birokrasi, good governance, dan anti-korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kesbangpol telah berupaya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program-program pencegahan korupsi secara optimal. Selain itu, perubahan dinamika politik dan sosial juga dapat mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas institusional Kesbangpol, meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian korupsi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam merancang dan melaksanakan program-program serupa. Selain itu, penelitian ini juga menyoroati pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya

pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Muthia Julian Zahra, Irma Cahyani, Raudhatul Natasya Annur, dan Kencana Firjatullah Kusuma atas kerja sama yang penuh dedikasi dan komitmen dalam setiap tahap penelitian ini. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan pula kepada Ibuk Yulia Hanoselina dan Ibuk Rahmadhona Fitri Helmi, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi Negara, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang sangat berarti selama proses penelitian dan penulisan ini.

7. DAFTAR REFERENSI

- Aksa, A. H. (2010). Etika administrasi publik: Peranannya dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(2).
- Anwaruddin, A. (2006). Pengembangan model kepemimpinan birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Universitas STIA LAN Bandung.
- Asih, N. M. S. (2018). Implementasi etika administrasi negara sebagai upaya untuk mencegah korupsi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(2), 94-104.
- Azra, A. (2002). Korupsi dalam perspektif good governance. *Indonesian Journal of Criminology*, 2(1), 4218.
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*.
- Fahruroji, dkk. (2020). Efektivitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 5(1), Maret 2020.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11.
- Holilah, H. (2013). Etika administrasi publik. *JRP-Jurnal Review Politik*, 3(2), 232-255.
- Putra, N., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13-24.

- Ridwan. (2014). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 64, 385-399.
- Rorong, M. E., & Lengkong, F. D. (2016). Implementasi kebijakan good governance pada sekretariat daerah Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Sam Ratulangi.
- Satria, H. (n.d.). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169-186.
- Sawir, M. (2020). Birokrasi pelayanan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Repository Universitas Yapis Papua.
- Tanjung, I. (2013). Kearifan lokal dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 101-110.
- Tarigan, F., & Aprillian, A. (2023). Peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum*, 2(1).
- Tri, Y. (2018). Etika administrasi publik.